

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Kurikulum

##### 1. Pengertian Manajemen Kurikulum

Kata manajemen berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata tersebut kemudian digabung menjadi sebuah kata kerja, yaitu *managere* yang artinya menangani. Kemudian kata *managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>1</sup> Pengelolaan yang dimaksud adalah melakukan sebuah proses untuk mewujudkan tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya.

Oemar Hamalik, dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pengembangan Kurikulum* mengemukakan manajemen adalah suatu proses sosial yang merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih dan dilakukan secara formal. Sebuah manajemen dapat dilaksanakan dengan bantuan berbagai sumber, seperti sumber manusia, sumber material, sumber biaya, serta sumber informasi. Manajemen juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode kerja tertentu secara efektif

---

<sup>1</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 3.

dan efisien yang mengacu pada pencapaian tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>2</sup>

Hal senada juga dinyatakan oleh George R. Terry, seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa: “*Management is performance of conceiving desired results by means of group efforts consisting of utilizing human talent and resources*”.<sup>3</sup> Dalam manajemen dibutuhkan adanya pemberdayaan manusia dan sumber lainnya untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen sangat penting untuk sebuah organisasi agar dapat mengelola apa yang ada untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai.

Sedangkan pengertian kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *currere* yang memiliki arti jarak tempuh lari. Pada awalnya istilah kurikulum tersebut digunakan di bidang olahraga, kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Istilah kurikulum tersebut dalam bahasa Arab disebut dengan *manhaj* yang berarti jalan terang yang dilalui seorang pendidik dan peserta didik untuk mengeksplor pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai-nilai.<sup>4</sup>

Oemar Hamalik juga memberikan pendapatnya mengenai kurikulum. Menurutnya, pengertian kurikulum dapat dibagi menjadi dua, yakni kurikulum menurut pandangan lama dan menurut pandangan baru.

---

<sup>2</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 16.

<sup>3</sup> Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 41.

<sup>4</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.

Dalam pandangan lama (pandangan tradisional), kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk mendapatkan surat tanda tamat belajar. Sedangkan pada pandangan baru, kurikulum memiliki sifat yang luas karena kurikulum tidak diartikan sebagai kumpulan beberapa mata pelajaran, tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah. Sehingga kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi bagian dari kurikulum.<sup>5</sup>

Dari penjelasan mengenai pengertian manajemen dan kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan titik berat pada usaha itu sendiri untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar.<sup>6</sup>

## 2. Landasan Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu memiliki landasan-landasan atau dasar sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 36 ayat 2 disebutkan bahwa “Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 3-4.

<sup>6</sup> Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 27.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 17 ayat 1 dinyatakan bahwa “Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.” Serta ayat 2 yang menegaskan bahwa “Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.”<sup>8</sup>
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dijelaskan mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, serta kalender pendidikan yang menjadi standar pendidikan nasional.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: t.p., t.t.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: t.p., t.t.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas ini berisi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan jenjang pendidikan.<sup>10</sup>

### **3. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum**

Ruang lingkup dalam manajemen kurikulum menjadi pusat dari kegiatan manajemen itu sendiri. Kegiatan tersebut meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan kurikulum. Manajemen perencanaan kurikulum memiliki dasar bahwa adanya informasi serta data mengenai masalah-masalah yang ditemui dan kebutuhan yang diperlukan itulah yang mendasari disusunnya perencanaan secara tepat. Manajemen pelaksanaan kurikulum didasarkan bahwa kurikulum sebelumnya telah direncanakan sehingga siap untuk dilaksanakan pada pembelajaran di kelas. Manajemen perbaikan kurikulum yang dimaksud yaitu apabila ditemukan masalah saat pelaksanaan kurikulum, maka sangat perlu untuk diadakan perbaikan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Adanya evaluasi kurikulum untuk melakukan perbaikan memerlukan informasi yang akurat dari semua kegiatan baik, perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dengan demikian, semua kegiatan yang terangkum dalam ruang lingkup manajemen kurikulum di atas berada pada sistem dengan

---

<sup>10</sup> *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: t.p., t.t.

siklus yang berkesinambungan, bertahap, dan bergilir dalam proses pendidikan yang menyeluruh.<sup>11</sup>

#### 4. Fungsi Manajemen

Beberapa pendapat mengenai fungsi manajemen telah dijelaskan oleh para ahli manajemen, di antaranya Henry Fayol sebagaimana dikutip oleh Manullang menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, *commanding*, *coordinating*, dan *controlling*. Kemudian Gullich membagi fungsi manajemen menjadi tujuh yang dikenal dengan POSDCORB (*planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *controlling*, *reporting*, dan *budgeting*). Sedangkan George R. Terry menyatakan empat fungsi manajemen, yaitu POAC (*planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling*).<sup>12</sup>

Fungsi manajemen yang lazim digunakan pada lembaga pendidikan di Indonesia adalah yang dikemukakan oleh George R. Terry, yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) dengan penjelasannya sebagai berikut.

##### a. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal manajemen kurikulum yang dapat dilakukan dengan menentukan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan

---

<sup>11</sup> Hamalik, *Manajemen.*, 20.

<sup>12</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 19.

untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>13</sup> Dengan kata lain, perencanaan kurikulum merupakan proses yang diusahakan dan dilakukan untuk menelaah keefektifan alat, cara atau sumber lain yang digunakan dalam pembelajaran.

Perencanaan kurikulum yang realistis menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Prinsip 1, tahap perencanaan kurikulum ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh siswa sebelum memasuki lingkungan sekolah.
- 2) Prinsip 2, perencanaan kurikulum disusun atas dasar berbagai keputusan mengenai isi sekaligus proses.
- 3) Prinsip 3, perencanaan kurikulum mencakup berbagai keputusan tentang isu dan topik.
- 4) Prinsip 4, tahap perencanaan kurikulum ini melibatkan berbagai pihak pendidikan.
- 5) Prinsip 5, tahap perencanaan kurikulum dilakukan di berbagai tingkatan atau jenjang.
- 6) Prinsip 6, perencanaan kurikulum merupakan sebuah proses yang bersifat kontinu sehingga setiap tahapan harus jelas dan dapat menjadi jembatan untuk tahap selanjutnya.

---

<sup>13</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 49.

<sup>14</sup> Hamalik, *Dasar-dasar.*, 172.

Pada tahap perencanaan terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Analisis kebutuhan, tahap ini merupakan penyelidikan terhadap suatu kejadian atau permasalahan untuk mengetahui penyebab atau keadaan yang sebenarnya.
- 2) Merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, setelah melakukan penyelidikan, langkah selanjutnya yaitu merumuskan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang sebelumnya telah ditemukan serta mencari jawaban untuk pemecahan masalah yang ada.
- 3) Menentukan desain kurikulum, hal ini dilakukan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan serta melakukan pembelajaran yang efektif agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
- 4) Membuat rencana induk (*master plan*) yang di dalamnya memuat langkah-langkah yang perlu dilakukan pada tahap pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian.<sup>15</sup>

Komponen-komponen perencanaan kurikulum terdiri dari:<sup>16</sup>

- 1) Tujuan, perumusan tujuan pembelajaran diperlukan agar aktivitas yang dilakukan memiliki arah. Dalam perumusan tujuan, sekolah harus memakai tujuan pendidikan nasional sebagai pedoman.

---

<sup>15</sup> Wahyudin, *Manajemen.*, 19.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 87.



- 2) Isi, merupakan susunan bahan pelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- 3) Aktivitas belajar, diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik. Aktivitas belajar sangat tergantung pada strategi yang digunakan.
- 4) Sumber, merupakan alat, sarana prasarana atau media lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Contoh dari sumber adalah buku, proyektor, perangkat komputer, dan lain-lain.
- 5) Evaluasi, dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan yang diperoleh. Evaluasi dapat dilakukan dengan memberikan tes tulis, tes lisan, observasi, dan teknik lainnya.

Perencanaan kurikulum juga memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas, di antaranya:<sup>17</sup>

- 1) Perencanaan sebuah kurikulum harus didasarkan pada konsep yang jelas agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan.
- 2) Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang dapat dipahami dengan baik, yakni dapat mengoordinasi unsur-unsur mendasar belajar mengajar yang efektif dan efisien.

---

<sup>17</sup> Hamalik, *Dasar-dasar.*, 172.

- 3) Perencanaan kurikulum harus bersifat cepat tanggap sekaligus antisipatif agar dapat membantu siswa menuju kehidupan yang kondusif.<sup>18</sup>
- 4) Tujuan pendidikan harus mencakup jangkauan yang luas mengenai kebutuhan dan minat individu serta masyarakat.
- 5) Rumusan tujuan pendekatan harus jelas agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan rencana kurikulum yang bersifat khusus.
- 6) Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengetahui hal yang ditunjukkan pada anak-anak mereka.
- 7) Seorang pendidik berhak dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi program sekolah.
- 8) Perencanaan dan pengembangan kurikulum dapat membuahkan hasil bila dikerjakan secara bersama-sama.
- 9) Perencanaan kurikulum harus mengandung sambungan program sekolah dan siswa di setiap jenjang dan tingkatan sekolah.
- 10) Program yang dirancang oleh sekolah hendaknya dapat mengoordinasikan semua unsur dalam kurikulum.
- 11) Sekolah dapat mengembangkan struktur organisasi yang memfasilitasi masalah kurikulum.
- 12) Penelitian tindakan dan evaluasi perlu diadakan guna menggiatkan kembali rencana dan program kurikulum.

---

<sup>18</sup> Ibid., 173.

- 13) Partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan perencanaan kurikulum.
- 14) Harus dilaksanakan evaluasi secara berkesinambungan pada semua aspek.
- 15) Berbagai jenjang sekolah harus merespon dan menyediakan berbagai hal untuk menunjang perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa.<sup>19</sup>

b. Pengorganisasian

Setelah dilakukan perencanaan, kegiatan selanjutnya dalam manajemen kurikulum adalah pengorganisasian. Tahap ini menjadi penghubung untuk tahap selanjutnya. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, yaitu urutan bahan, kesinambungan, keseimbangan, dan keterpaduan yang arahnya berkaitan dengan lingkup (*scope*).<sup>20</sup>

Pengorganisasian adalah proses penyatuan dan pengumpulan sumber daya manusia serta sumber yang lainnya dalam sebuah organisasi untuk mengatur dan menyusun sebagian atau seluruh hal yang mana dengan adanya pembidangan tersebut akan dapat diketahui manfaatnya sebagai berikut.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., 174.

<sup>20</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 60.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Sleman: Graha Cendekia, 2017), 15.

- 1) Mengetahui batas-batas antara bidang yang satu dengan bidang yang lain serta dapat mengatur tentang bagaimana antarbagian dapat melakukan kerja sama agar sinkronisasi tugas dapat tercapai.
- 2) Dengan memberikan tugas yang jelas terhadap pelaksana manajemen kurikulum, mereka akan mengetahui wewenang dan kewajibannya.
- 3) Mengetahui hubungan vertikal dan horizontal pada jalur yang berkenaan dengan struktur maupun fungsional melalui cara digambarkannya unit-unit kegiatan dalam struktur organisasi.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, hal-hal yang dapat dilakukan dalam tahap pengorganisasian adalah pembagian tugas mengajar untuk guru, penyusunan jadwal pelajaran sekaligus kegiatan ekstrakurikuler, serta penyusunan jadwal pengembangan kinerja guru.<sup>22</sup> Pada tahap pengorganisasian kurikulum terdapat beberapa prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas, di antaranya:<sup>23</sup>

- 1) Prosedur *Employee*

Sifat dari prosedur ini sangat umum. Sesuai dengan namanya, prosedur *employee* menitikberatkan peran seorang guru yang mana penguasaan terhadap isi kurikulum di kalangan guru menjadi penentu pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum

---

<sup>22</sup> Ibid., 16-17.

<sup>23</sup> Hamalik, *Dasar-dasar.*, 162.

tersebut. Dalam praktiknya, prosedur ini sering diterapkan ke prosedur yang lain.

## 2) Prosedur Buku Pelajaran

*The textbook procedure* ini menggunakan buku pelajaran yang telah dipilih oleh panitia untuk menentukan pemilihan isi kurikulum. Buku pelajaran dipilih karena pada dasarnya sebuah buku pelajaran telah disusun oleh seorang yang ahli di bidangnya, sehingga memungkinkan bahwa guru akan semakin mudah menjalankan tugasnya. Apabila telah tersedia buku yang lengkap untuk suatu mata pelajaran, maka keseluruhan kurikulum bagi mata pelajaran tersebut dapat disusun secara lengkap pula.

## 3) Prosedur Survei Pendapat

Pemilihan dan pengorganisasian dalam *the survey of opinions procedure* ini dilaksanakan dengan mengadakan penelitian atau survei terhadap pendapat banyak pihak seperti guru, para ahli, kelompok masyarakat, pemimpin, dan para siswa yang bertujuan untuk mendapatkan permasalahan agar nantinya para siswa dapat mempelajari dan memecahkannya di sekolah.<sup>24</sup>

## 4) Prosedur Studi Kesalahan

Prosedur ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan dan kelemahan pada saat pelaksanaan kurikulum dengan cara

---

<sup>24</sup> Ibid., 163.

menganalisis permasalahan yang ditemukan tersebut. Setelah analisis dilakukan, akan diadakan perbaikan terkait materi kurikulum yang akan datang. Perbaikan yang dilakukan hanya sebatas pada kesalahan yang ditemukan, dengan kata lain perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh.

#### 5) Prosedur Mempelajari Kurikulum Lainnya

Prosedur ini dapat disebut dengan cara tambal sulam, artinya seorang guru atau sekolah dapat mempelajari kurikulum lembaga lain untuk kemudian diterapkan di sekolahnya dengan cara menyesuaikan isi dan tujuan yang ingin dicapai. Namun, akan lebih baik apabila penyusunan kurikulum bersumber dari apa yang dibutuhkan sekolah, yang benar-benar relevan dengan keadaan sekolah tersebut.

#### 6) Prosedur Analisis Kegiatan Orang Dewasa

Pemilihan prosedur ini didahului oleh studi terhadap aktivitas-aktivitas yang ada dalam kehidupan. Hal tersebut berguna untuk menemukan beberapa kegiatan yang diperkirakan dapat dipelajari oleh siswa. Umumnya, kegiatan yang akan dianalisis berasal dari orang dewasa yang termasuk dalam lingkup pekerjaan atau jabatan mereka. Kemudian dilakukan identifikasi pada setiap jenis atau

penggolongan kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang telah dianalisis dan diidentifikasi harus sesuai dengan kesiapan siswa.<sup>25</sup>

#### 7) Prosedur Fungsi-fungsi Sosial

Prosedur ini hampir sama dengan prosedur sebelumnya yang melakukan analisis kegiatan. Hal yang menjadi pembeda adalah prosedur ini memiliki pandangan yang lebih luas karena dalam masyarakat ditemukan banyak sekali fungsi sosial. Dari fungsi-fungsi sosial yang ditemukan tersebut akan dikelompokkan menjadi area kehidupan yang tentunya dapat mempengaruhi pengorganisasian kurikulum.

#### 8) Prosedur Minat dan Kebutuhan Remaja

Lingkup dari *the youth interest and needs procedure* ini berkaitan dengan fungsi-fungsi sosial yang ada pada orang dewasa. Prosedur ini memperhatikan latar belakang, kematangan, minat serta kebutuhan para siswa dan disesuaikan dengan fungsi sosial dan personal. Dengan begitu, jelas bahwa prosedur ini tidak bersifat individualistis, tetapi didasarkan pada hubungan antara individu remaja dengan lingkungannya.<sup>26</sup>

#### c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kurikulum merupakan proses penerapan atau implementasi program kurikulum yang telah dikembangkan sebagai

---

<sup>25</sup> Ibid., 164.

<sup>26</sup> Ibid., 166.

upaya untuk membawa apa yang telah direncanakan sebelumnya ke dalam tindakan operasional.<sup>27</sup> Dalam tahap ini pihak-pihak yang telah ditunjuk akan melaksanakan semua tugasnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Tahap pelaksanaan atau implementasi kurikulum mencakup beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan program yang mencakup program tahunan (prota), program semester (promes), pengembangan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ada pula program bimbingan dan konseling serta program remedial yang akan dilakukan.
- 2) Pelaksanaan pembelajaran, dalam hal ini guru bertugas untuk mengondisikan lingkungan belajar agar dapat mendukung situasi belajar mengajar sehingga perilaku peserta didik dapat berubah karena tujuan pembelajaran adalah terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik ke arah yang lebih baik.
- 3) Evaluasi yang dilakukan selama proses pelaksanaan kurikulum satu semester. Penilaian dapat dilakukan dengan dua hal yaitu formatif dan sumatif.<sup>28</sup>

Dalam melakukan pengembangan silabus terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Prinsip-prinsip tersebut disampaikan oleh

---

<sup>27</sup> Ibid., 238.

<sup>28</sup> Ibid.



Mulyasa yang dikutip oleh M. Fadlillah, di antaranya yaitu pengembangan silabus harus bersifat ilmiah, relevan, fleksibel, berkesinambungan, konsisten, memadai, bersifat aktual dan kontekstual, efektif serta efisien.<sup>29</sup> Sembilan prinsip yang telah disebutkan akan sangat menentukan berjalannya proses pembelajaran. Sedangkan prinsip-prinsip pengembangan RPP ditulis langsung oleh M. Fadlillah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Penyusunan RPP digunakan untuk mempermudah pembelajaran, terutama untuk siswa.
- 2) Pengembangan RPP sangat memperhatikan kondisi awal siswa dari segala aspek yang ada.
- 3) Pengembangan RPP bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar dapat berperan aktif.
- 4) RPP harus dapat mengembangkan faktor internal dan eksternal yang dimiliki siswa.
- 5) Dengan RPP diharapkan budaya literasi dapat lebih berkembang.
- 6) Program yang tercantum dalam RPP harus mempertimbangkan kemampuan masing-masing siswa serta tindak lanjut apabila diperlukan perbaikan dan pengayaan.
- 7) Sebuah RPP harus dibuat dengan prinsip keterkaitan dan terpadu antarkomponen RPP.

---

<sup>29</sup> M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 138-140.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 145.

- 8) Penyusunan RPP sebaiknya juga memperhatikan informasi dan teknologi yang berkembang.<sup>31</sup>

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari implementasi kurikulum, yaitu:

- 1) Perolehan kesempatan yang sama

Memberikan tempat yang mampu memberdayakan semua peserta didik secara adil dan demokratis merupakan hal yang diutamakan dari prinsip ini. Adil yang dimaksud adalah dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar, keterampilan, serta sikap dari seluruh pendidik. Sedangkan demokratis berarti bahwa peserta didik dapat mengutarakan pendapatnya tanpa adanya ancaman atau paksaan.<sup>32</sup>

- 2) Berpusat pada anak

Peserta didik perlu memiliki kemauan belajar, pemahaman isi materi, dan pengetahuan yang berkembang terkait pelajaran agar dapat membuat mereka menjadi mandiri, dapat bekerja sama, serta memberi nilai pada diri sendiri. Dengan demikian, adanya penilaian sangat diperlukan untuk mengukur perkembangan peserta didik. Adapun proses penilaian dapat dilakukan melalui pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

---

<sup>31</sup> Ibid., 146.

<sup>32</sup> Hamalik, *Dasar-dasar.*, 239.

### 3) Pendekatan dan kemitraan

Dalam pengorganisasian pengalaman belajar, digunakan pendekatan yang berfokus kepada kebutuhan siswa yang bervariasi dan menyatukan berbagai disiplin ilmu. Semua pengalaman belajar mulai dari Taman Kanak-kanak hingga kelas I sampai dengan kelas XII telah dirancang secara kontinu. Sehingga pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan serta tanggung jawab antara pihak yang terkait, yaitu peserta didik, pendidik, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja dan industri, orang tua, serta masyarakat.<sup>33</sup>

### 4) Kesatuan kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan

Standar kompetensi menjadi kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan, karena meskipun standar kompetensi disusun oleh pusat, tetapi cara pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pada masing-masing sekolah atau daerah. Pelaksanaan kurikulum di masing-masing daerah juga perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Perencanaan serta pelaksanaan pendidikan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pusat.

---

<sup>33</sup> Ibid., 240.

<sup>34</sup> Ibid., 241.

- b) Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan perluasan kesempatan berimprovisasi dan berkreasi.
  - c) Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya penegasan tanggung jawab bersama di antara sekolah, orang tua, masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
  - d) Adanya peningkatan tanggung jawab kinerja proses pendidikan.
  - e) Adanya wujud keterbukaan sekaligus kepercayaan dalam pengelolaan pendidikan agar dapat menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa.
  - f) Penyelesaian masalah pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan.
- d. Pengendalian

Pengendalian dapat diartikan sebagai pengawasan, karena tahap ini berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan sekaligus menghindari terjadinya penyelewengan. Pengawasan adalah bentuk usaha seorang pimpinan untuk mengetahui hal-hal yang mencakup pelaksanaan kerja, terutama kelancaran kerja para pegawai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Mulyani yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana menyatakan bahwa pengawasan sebagai kontrol memiliki tujuan untuk mengukur tingkat

keefektifan aktivitas kerja yang telah dilaksanakan dan tingkat efisiensi dalam penggunaan komponen.<sup>35</sup>

Tahap pengendalian ini juga sering disebut sebagai evaluasi. Menurut Morrison, dalam buku karya Oemar Hamalik, evaluasi adalah kegiatan pertimbangan yang didasarkan pada seperangkat ukuran penilaian yang telah disepakati bersama serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup>

Dalam evaluasi terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam bertindak, yaitu:

- 1) Tujuan tertentu, setiap program evaluasi kurikulum harus mengarah untuk mencapai tujuan yang spesifik karena tujuan itulah yang akan mengarahkan kegiatan saat pelaksanaan kurikulum.
- 2) Bersifat objektif, artinya evaluasi dilaksanakan berdasarkan sumber atau pada keadaan dan data yang sebenarnya yang diperoleh dari instrumen andal.
- 3) Bersifat komprehensif, semua aspek yang ada dalam ruang lingkup kurikulum harus memperoleh perhatian dan pertimbangan sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
- 4) Kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

---

<sup>35</sup> Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen.*, 18-19.

<sup>36</sup> Hamalik, *Dasar-dasar.*, 253.

- 5) Efisien, terutama untuk penggunaan waktu, biaya, serta tenaga dan peralatan yang digunakan.
- 6) Kontinu, maksudnya adanya tuntutan dari dalam dan luar sekolah memerlukan tindak lanjut berupa perbaikan kurikulum.

Evaluasi bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum yang dilaksanakan dengan cara memperlihatkan proses-proses yang dilaksanakan, khususnya yang telah tercapai sesuai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi kurikulum juga ditujukan untuk melihat kemampuan kerja kurikulum secara totalitas ditinjau dari berbagai kriteria yang ditetapkan. Indikator yang biasa dievaluasi dalam kurikulum meliputi ketepatan tujuan, ketepatan waktu, keterkaitan antarmata pelajaran dengan tujuan pendidikan, serta kelayakan program yang direncanakan.<sup>37</sup>

Tahap evaluasi setidaknya memerlukan empat prosedur strategi evaluasi sebagai berikut.<sup>38</sup>

#### 1) Evaluasi Kebutuhan dan *Feasibility*

Evaluasi kebutuhan dan *feasibility* dapat dilakukan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana. Langkah-langkah yang dapat dilakukan di antaranya yaitu:

- a) Merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran maupun program yang disampaikan.

---

<sup>37</sup> Wahyudin, *Manajemen.*, 149.

<sup>38</sup> Hamalik, *Dasar-dasar.*, 258.

- b) Menentukan program yang dibutuhkan.
- c) Melakukan penilaian pada data yang didasarkan pada tes yang dilakukan, baik tes intelegensi maupun tes sikap.
- d) Melakukan penilaian terhadap riset yang ada.
- e) Menentukan *feasibility* pelaksanaan program berdasarkan sumber manusiawi dan materiil.
- f) Mengetahui tanda-tanda masalah yang mendasari kebutuhan.
- g) Menetapkan cara yang digunakan untuk pengembangan proyek sebagai sumbangan untuk sistem sekolah.

## 2) Evaluasi Input

Evaluasi input bertujuan untuk menentukan cara pemecahan masalah sehingga memerlukan ahli mata pelajaran, pengawas utama, serta konsultan. Pemecahan masalah yang dilakukan harus melihat hubungan masalah tersebut dengan hambatan. Keputusan dalam evaluasi input sangat membutuhkan informasi yang akurat untuk menuju pengembangan berbagai strategi dan prosedur.<sup>39</sup>

## 3) Evaluasi Proses

Evaluasi proses merupakan sistem mengelola informasi sebagai upaya menentukan keputusan yang berkaitan dengan perluasan, perubahan, dan klarifikasi rencana pemecahan atau penyelesaian masalah dengan cermat.

---

<sup>39</sup> Ibid., 259.

#### 4) Evaluasi Produk

Evaluasi ini mengukur berbagai hasil program yang dilaksanakan.

Variabel yang diuji atau diukur tergantung pada tujuan, perubahan sikap, perbaikan kemampuan serta tingkat kehadiran.

### 5. Desain Kurikulum

Fred Percival dan Henry Ellington, dalam buku Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* menyatakan desain kurikulum merupakan kegiatan pengembangan dari keseluruhan proses perencanaan, validasi, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum yang dilakukan. Desain kurikulum juga dapat diartikan sebagai rencana dari berbagai unsur kurikulum, yang terdiri atas tujuan dan isi kurikulum, pengalaman belajar, serta evaluasi. Dari keempat unsur tersebut dapat ditentukan langkah-langkah pengembangan yang selanjutnya mengacu pada jenis-jenis desain kurikulum. Mengenai desain kurikulum, Saylor mengemukakan depalan prinsip sebagai acuan untuk mendesain kurikulum sebagai berikut.<sup>40</sup>

- a. Desain kurikulum seharusnya memudahkan serta mendorong pemilihan dan pengembangan berbagai jenis pengalaman belajar yang penting guna mencapai prestasi belajar yang diharapkan.
- b. Desain mencakup berbagai pengalaman belajar dengan tujuan agar dapat mencapai maksud dari pendidikan.

---

<sup>40</sup> Ibid., 193.



- c. Desain perlu menyediakan kesempatan bagi guru untuk memanfaatkan prinsip belajar dalam memilih, memberi bimbingan, dan melakukan pengembangan semua kegiatan belajar di sekolah.
- d. Desain harus memberi kesempatan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kemampuan, dan tingkat kematangan siswa.
- e. Desain harus memberi dorongan untuk guru agar mempertimbangkan pengalaman belajar siswa yang diperoleh dari luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah.
- f. Desain perlu menyediakan pengalaman belajar yang kontinu agar kegiatan belajar dapat berkembang.
- g. Kurikulum perlu didesain untuk dapat mempermudah siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi.
- h. Desain kurikulum harus bersifat nyata, layak, serta dapat diterima.

Terdapat beberapa macam desain kurikulum menurut Nana Syaodih sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a. *Subject-centered Design* (Desain yang berpusat pada mata pelajaran)

*Subject-centered design* adalah desain yang berpusat pada bahan ajar atau mata pelajaran dan merupakan bentuk tertua serta paling sering digunakan di antara desain kurikulum yang lain. Pada

---

<sup>41</sup> Sukmadinata, *Pengembangan.*, 113.

desain ini kurikulum akan dipusatkan pada materi yang dipelajari agar dapat menguasai pengetahuan, isi, nilai-nilai serta warisan budaya di masa lalu dan berupaya untuk mewariskan semuanya ke generasi berikutnya. Dalam desain kurikulum ini, berbagai mata pelajaran diajarkan dengan cara terpisah-pisah. Desain ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu:

1) *The Subject Design* (Desain dengan pendekatan mata pelajaran)

Bahan maupun konten kurikulum dalam desain ini disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah, misalnya seperti mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, fisika, kimia, berhitung, dan lain-lain. Untuk pengembangan kurikulum yang dilakukan di dalam kelas ketika aktivitas belajar mengajar, seorang guru hanya mempunyai tanggung jawab terhadap mata pelajaran yang diajarkannya. Desain ini memiliki dasar bahwa apa yang membedakan manusia dari makhluk lain adalah kecerdasan yang mereka miliki. Oleh karena itu, lebih baik jika dalam perencanaan kurikulum dipusatkan pada mata pelajaran, yaitu pada pengetahuan-pengetahuan agar manusia dapat bertambah cerdas.<sup>42</sup>

2) *The Disciplines Design* (Desain dengan pendekatan disiplin ilmu)

Salah satu bentuk pengembangan dari *subject centered design* yaitu *disciplines design*. Desain ini lebih menekankan pada

---

<sup>42</sup> Ibid., 114.

pemahaman informasi, bukan pada penguasaan fakta-fakta. Dalam desain ini, suatu pengetahuan juga telah dibedakan secara tegas, tidak seperti pada *subject centered design*. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh desain ini adalah mempunyai organisasi yang efektif dan berhubungan dengan suatu sistem yang teratur sehingga dapat memelihara mutu intelektual manusia. Selain itu, pada desain ini peserta didik tidak hanya menguasai fakta, tetapi lebih kepada konsep, hubungan, dan proses-proses intelektual yang berkembang pada siswa.<sup>43</sup>

### 3) *Broad-field Design* (Desain dengan pendekatan bidang studi)

Desain ini merupakan pengembangan dari *subject design* dan *disciplines design*. *Broad-field design* menyatukan beberapa mata pelajaran yang masih berkaitan menjadi satu bidang studi, seperti sejarah, geografi, dan ekonomi disatukan menjadi pengetahuan sosial, sedangkan biologi, kimia, dan fisika disatukan menjadi ilmu pengetahuan alam. Ciri umum dari desain ini adalah kurikulum hanya terdiri dari suatu bidang pengajaran yang di dalamnya terdapat beberapa mata pelajaran yang saling berhubungan. Adapun tujuan dari desain ini adalah untuk menyiapkan para peserta didik yang hidup dalam perkembangan

---

<sup>43</sup> Ibid., 115-116.

iptek yang sangat pesat agar memiliki pemahaman yang bersifat menyeluruh.<sup>44</sup>

b. *Learner-centered Design* (Desain yang berpusat pada peserta didik)

*Desain* ini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada siswa. *Learner-centered design* lebih mengutamakan siswa dalam aktivitas pengajaran karena yang nantinya akan berkembang adalah siswa itu sendiri. Pendidik dalam hal ini hanya berperan untuk menciptakan situasi yang nyaman dan mendukung proses belajar mengajar, memberi arahan dan bimbingan sesuai kebutuhan siswa. Ada dua ciri utama yang dimiliki oleh desain ini, yaitu: pertama, pengembangan kurikulum pada desain ini bukan dari konten kurikulum, melainkan berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhannya. Kedua, desain ini bersifat *not-preplanned* atau tidak direncanakan sebelumnya. Variasi dari *Learner-centered design* adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1) *The Activity* atau *Experience Design* (Desain dengan pendekatan aktivitas dan pengalaman)

Desain kurikulum ini berpusat pada kebutuhan peserta didik. Ciri utama yang dimiliki oleh desain ini adalah pertama, yang menjadi penentu struktur kurikulum yaitu minat dan kebutuhan peserta didik. Kedua, kurikulum akan disusun oleh guru

---

<sup>44</sup> Ibid., 116-117.

<sup>45</sup> Ibid., 117-118.

bersama dengan siswa. Ketiga, yang ditekankan dalam desain kurikulum ini adalah cara untuk memecahkan masalah yang ditemukan.

Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh desain ini, yaitu pertama, motivasi yang diberikan bersifat intrinsik dan tidak perlu ada rangsangan dari luar. Kedua, proses pembelajaran lebih memperhatikan perbedaan individual sehingga para siswa akan turut serta dalam kegiatan belajar kelompok karena mereka sadar membutuhkannya. Ketiga, aktivitas dalam mencari pemecahan masalah dapat menjadi bekal bagi siswa untuk menghadapi kehidupan di luar lingkungan sekolah. Meskipun demikian, desain ini juga mendapatkan beberapa kritik yang kemudian menunjukkan kelemahannya. Salah satu kritik terhadap desain ini, yaitu model desain ini menuntut dilaksanakan oleh guru ahli sekaligus ahli psikologi perkembangan dan hubungan antarmanusia.<sup>46</sup>

c. *Problem-centered Design* (Desain yang berpusat pada masalah)

Desain ini memusatkan pada berbagai jenis masalah yang dihadapi masyarakat. *Problem-centered* berasal dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain untuk hidup bersama sehingga akan menghadapi serta memecahkan masalah bersama. Konsep tersebut dijadikan landasan dalam

---

<sup>46</sup> Ibid., 118-120.

pendidikan, pengembangan kurikulum dan isi kurikulum yang berupa masalah-masalah sosial yang ditemui oleh peserta didik. Variasi model pada *problem-centered design*, yaitu:<sup>47</sup>

1) *The Areas of Living Design* (Desain dengan pendekatan bidang kehidupan)

Pada desain ini menekankan prosedur belajar melalui *problem-solving*. Karakteristik lain dari desain ini adalah menggunakan pengalaman dan situasi nyata dari siswa sebagai jalan pembuka untuk mempelajari bidang-bidang kehidupan, sehingga desain ini mampu memberi pendekatan pemenuhan kebutuhan untuk hidup di masyarakat. Beberapa kelebihan yang dimiliki desain ini, yaitu: pertama, desain ini merupakan bentuk integrasi dari *subject design*. Kedua, pada desain ini dapat menerapkan prinsip belajar aktif. Ketiga, bahan ajar disajikan dalam bentuk yang relevan. Keempat, bahan ajar yang disajikan bersifat fungsional. Kelima, motivasi belajar bersifat intrinsik atau datang dari dalam diri peserta didik sendiri. Adapun kelemahan desain ini salah satunya yaitu pemusatan perhatian terhadap masalah yang dihadapi akan membuat peserta didik tidak dapat melihat alternatif lain karena cenderung didoktrinasi dengan masalah yang ada.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., 120.

<sup>48</sup> Ibid., 120-121.

## 2) *The Core Design* (Desain dengan pendekatan inti kurikulum)

Integrasi bahan ajar pada desain ini memilih mata pelajaran atau bahan ajar tertentu sebagai inti. Istilah *core curriculum* menunjuk pada organisasi suatu rencana yang mengatur bagian inti dari suatu program pendidikan umum di sekolah. Konsep dari desain kurikulum ini adalah memusatkan inti-inti dari bahan ajar pada kebutuhan individual maupun sosial.<sup>49</sup>

Beberapa ciri-ciri dari *core curriculum* adalah pertama, program kurikulum inti melengkapi pendidikan umum, sedangkan tujuan programnya adalah seluas hasil dasar yang dicapai. Kedua, kelas dalam *core curriculum* disusun dan diatur untuk dua atau lebih periode kelas pada umumnya. Ketiga, aktivitas dan segala pengalaman belajar disusun dalam bentuk kesatuan. Keempat, guru menggunakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan bebas. Kelima, program kurikulum menggunakan berbagai jenis pengalaman belajar.

## **B. Pendidikan Agama Islam**

### **1. Pengertian Pendidikan Agama Islam**

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, agama Islam merupakan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mana ajarannya

---

<sup>49</sup> Ibid., 122

diyakini dapat menyempurnakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi atau Rasul sebelum Nabi Muhammad. Dalam Islam, ajarannya mencakup bidang akidah, syariat, dan akhlak yang dapat mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antarsesama manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>50</sup>

Secara umum pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang materinya berasal dari sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Alquran dan Hadis. Materi dari kedua sumber tersebut tidak serta merta disampaikan kepada peserta didik begitu saja, akan tetapi lebih dikembangkan untuk memperluas wawasan peserta didik. Selain tujuan tersebut, pendidikan agama Islam juga bertujuan untuk mengembangkan karakter peserta didik agar menjadi lebih baik lagi. Untuk memperoleh pengertian pendidikan agama Islam secara lebih rinci, peneliti memberikan definisi dari beberapa ahli.

- a. Muhaimin, dalam bukunya menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya untuk mengajarkan agama Islam atau ajaran Islam beserta nilai-nilainya agar menjadi *way of life* atau pandangan dan pedoman sikap hidup seseorang. Pendidikan agama Islam yang dimaksud dapat diwujudkan dengan segenap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menanamkan ajaran Islam itu sendiri.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 109.

<sup>51</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum.*, 7-8.



- b. M. Arifin, dalam bukunya menyebutkan bahwa pada dasarnya pendidikan agama Islam adalah usaha orang dewasa yang beragama Islam dan bertakwa dengan secara sadar membimbing dan memberi arah pada pertumbuhan, serta perkembangan fitrah atau bakat bawaan dari peserta didik melalui ajaran-ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan mereka.<sup>52</sup>
- c. Tayar Yusuf dalam buku karya Abdul Majid dan Dian Andayani mengartikan pendidikan agama Islam adalah kegiatan yang dilakukan generasi tua secara sadar sebagai usaha untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, kecakapan serta keterampilan pada generasi muda agar kelak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Swt.<sup>53</sup>

## 2. Dasar dan Proyeksi Pendidikan Agama Islam

Dasar dan proyeksi merupakan dua hal yang sangat mendasar dan bersifat pokok dalam pendidikan. Hal tersebut dikarenakan dengan dasar dan proyeksi pendidikan tersebut akan menentukan sifat atau paham pendidikan yang ada serta mempengaruhi keadaan pendidikan di masa yang akan datang. Dasar pendidikan agama di Negara Indonesia berkaitan erat dengan dasar pendidikan Nasional yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Dikatakan

---

<sup>52</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 22.

<sup>53</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 130.

demikian karena pendidikan agama Islam juga berperan serta dalam mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.<sup>54</sup>

- a. Dasar yuridis, merupakan dasar pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan pendidikan agama baik secara langsung maupun tidak langsung di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia. Dasar yuridis ini dapat diambil dari falsafah negara (pancasila), UUD 1945, ataupun dasar-dasar lain yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama secara langsung.<sup>55</sup>
- b. Dasar religius, berarti dasar-dasar yang berasal dari agama Islam itu sendiri, yang mana dapat tertulis dalam ayat-ayat Alquran, hadis Nabi, maupun sumber lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa melakukan pendidikan agama adalah perintah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada-Nya.
- c. Dasar dari sosial psikologis, dasar ini memiliki pengertian bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini memerlukan adanya suatu pedoman hidup yang disebut agama. Oleh karena itu, dasar ini berkeyakinan bahwa seseorang akan selalu mengusahakan agar dirinya dekat dengan Tuhan sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai bukti bahwa manusia memerlukan pedoman. Pernyataan yang demikian juga

---

<sup>54</sup> Farid Hasyim, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Malang: Madani, 2015), 49-50.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 51-52.

menjadi dasar diperlukannya pendidikan agama Islam bagi orang-orang muslim agar dapat mengarahkan fitrah mereka ke arah yang lebih baik sehingga mereka dapat mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai dengan yang Islam ajarkan.<sup>56</sup>

### 3. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam tentu memiliki tujuan. Hal tersebut dinyatakan oleh Abdul Majid dan Dian Andayani bahwa tujuan yang dimaksud yaitu untuk memunculkan rasa iman sekaligus meningkatkan kualitas iman melalui pemberian pengetahuan serta pembiasaan mengenai ajaran-ajaran Islam. Dengan pengetahuan yang didapatkan serta pembiasaan yang dilakukan diharapkan peserta didik menjadi manusia muslim yang terus berkembang wawasan, iman dan takwanya, dapat berbangsa dan bernegara dengan baik, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>57</sup>

Sedangkan menurut Hasan Langgulung, tujuan pendidikan agama Islam seharusnya dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh agama yang mana terdiri dari tiga fungsi, yaitu fungsi spiritual, fungsi psikologis, dan fungsi sosial.<sup>58</sup> Apabila digali dan dipelajari lebih dalam ketiga fungsi tersebut mengandung unsur-unsur pendidikan yang penting untuk kehidupan. Fungsi spiritual yang berhubungan langsung dengan

---

<sup>56</sup> Ibid., 54.

<sup>57</sup> Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama.*, 130-132.

<sup>58</sup> Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 178.

kerohanian dapat dijadikan dasar yang kuat dan juga dirasa mampu memberikan arah kehidupan bagi manusia. Fungsi psikologis atau sering disebut fungsi kejiwaan dapat dijadikan sebagai sudut pandang dalam pemberdayaan peserta didik agar dapat mencapai fitrahnya dengan benar. Sedangkan fungsi sosial dalam pendidikan Islam dapat memacu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dalam hubungan sosialnya sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan tempat mereka berada.

Langgulung juga mengutip pemikiran Al-Abrasyi mengenai tujuan pendidikan Islam sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Untuk membentuk akhlak yang mulia pada peserta didik. Sejak dahulu kaum muslimin setuju bahwa pendidikan akhlak merupakan inti pendidikan Islam sehingga perlu perhatian khusus dalam pelaksanaannya. Tujuan ini juga sesuai dengan yang tertera dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Walaupun namanya pendidikan Islam, tetapi pada kenyataannya titik berat pendidikan tersebut bukan hanya pada keagamaan atau akhirat saja, tetapi juga pada kehidupan dunia yang meliputi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan alam tempat mereka hidup.

---

<sup>59</sup> Ibid., 60-61.

- c. Dari segi pemeliharaan manfaat, pendidikan Islam dapat digunakan sebagai persiapan untuk mencari rezeki, atau sekarang ini lebih terkenal dengan nama tujuan-tujuan vokasional dan profesional.
- d. Pendidikan Islam dapat menumbuhkan semangat ilmiah pada peserta didik serta memenuhi keingintahuan dan memungkinkan mereka mengkaji ilmu lebih dalam lagi.
- e. Menyiapkan pembelajaran secara profesional, yang berdasarkan sistem atau prosedur tertentu agar dapat menguasai profesi tertentu dan keterampilan-keterampilan lain di luar profesinya supaya dapat mencari rezeki dalam hidup selain usaha memelihara keagamaan.

### **C. Penelitian Relevan**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang manajemen kurikulum PAI di berbagai jenjang pendidikan. Dari beberapa penelitian tersebut membahas berbagai fokus penelitian yang akan dianalisis, di antaranya mengenai perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan manajemen kurikulum. Beberapa penelitian tentang manajemen kurikulum dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Amilda dan Nina Wati, dalam jurnalnya yang berjudul Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Harapan Mulia Palembang memaparkan sebagai berikut:

- a) Proses perencanaan kurikulum PAI di SD IT tersebut dimulai dari kegiatan penyusunan program kurikulum PAI, kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan silabus kurikulum PAI, penyusunan administrasi mengajar yang terdiri dari program tahunan (prota), program semester (prosem) serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- b) Di SD IT Harapan Mulia Palembang kegiatan pengorganisasian kurikulum terdiri dari penyusunan jadwal mengajar bagi para guru, program belajar, kalender akademik, jadwal kegiatan ekstrakurikuler, dan pengaturan tugas serta kewajiban guru.
- c) Kurikulum PAI tingkat kelas dilaksanakan secara langsung oleh guru PAI di dalam kelas sebagai pemegang kunci utama yang dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kurikulum PAI yang diharapkan.
- d) Kegiatan pengawasan kurikulum PAI di SD IT Harapan Mulia Palembang dilakukan dengan cara pemantauan kamera CCTV yang ada di setiap kelas. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu sekaligus kualitas guru PAI dan dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung dan juga supervisi pendidikan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Amilda dan Nina Wati, "Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Harapan Mulia Palembang", *Jurnal of Islamic Education Management*, 2 (Desember, 2016), 28-29.

2. Wiji Hidayati, dengan judul Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Jenjang SMA Bermuatan Keilmuan Integrasi Interkoneksi. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan sebagai berikut:
- a) Perencanaan kurikulum mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dilakukan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berbasis pada perencanaan bermuatan keilmuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan terjalin antara epistemologi bayani, irfani dan burhani.
  - b) Pengorganisasian materi kurikulum di SMA dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ruang lingkup, urutan bahan, kesinambungan kurikulum dalam organisasi kurikulum, keseimbangan antarbahan pelajaran, keterpaduan dan alokasi waktu yang dibutuhkan, yang mana bersumber dari buku siswa mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas X, XI dan XII yang disusun pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - c) Pelaksanaan kurikulum dilakukan pada proses pembelajaran oleh guru dan siswa agar dapat mencapai SKL, KI, dan KD yang merupakan tujuan dari kurikulum. Proses pembelajaran akan memuat tiga epistemologi burhani, bayani dan irfani.
  - d) Tahap pengawasan dalam manajemen kurikulum PAI dan Budi Pekerti dilakukan dengan menggunakan penilaian acuan kriteria (PAK) yang mana penilaian pencapaian kompetensi didasarkan pada kriteria

ketuntasan minimal (KKM) yang sebelumnya telah ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik KD.<sup>61</sup>

3. Moh. Rofie, dengan judul *Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pesantren* memberikan kesimpulan:

- a) Perencanaan kurikulum di lembaga tersebut dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait, salah satunya yaitu dewan guru bidang studi PAI. Mereka menentukan kurikulum yang akan digunakan sekaligus melakukan perbaikan apabila ditemukan hal yang perlu perbaikan. Perencanaan kurikulum ini dilaksanakan setiap akhir semester.
- b) Pelaksanaan kurikulum di lembaga ini dilakukan secara formal, yaitu dengan kegiatan pembelajaran di kelas dan secara nonformal yang meliputi seluruh kegiatan di pesantren.
- c) Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan evaluasi program, evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar, serta evaluasi kegiatan mingguan dan tahunan yang dapat berguna untuk menentukan tindakan perbaikan pada semester berikutnya.<sup>62</sup>

4. Amri Yusuf Lubis menjelaskan dalam jurnalnya berjudul *Pelaksanaan Manajemen Kurikulum pada SMA Negeri 1 Buengcala Kabupaten Aceh Besar* sebagai berikut:<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Wiji Hidayati, "Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Jenjang SMA Bermuatan Keilmuan Integrasi Interkoneksi", *Manageria*, 2 (November, 2016), 208-219.

<sup>62</sup> Moh. Rofie, "Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pesantren", *Reflektika*, 2 (Juli-Desember, 2017), 167-168.

<sup>63</sup> Amri Yusuf Lubis, "Pelaksanaan Manajemen Kurikulum pada SMA Negeri 1 Buengcala Kabupaten Aceh Besar", *Administrasi Pendidikan*, 1 (Februari, 2015), 30.



- a) Kegiatan perencanaan manajemen kurikulum dilakukan dengan mengembangkan silabus sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat itu. Selain itu, penyusunan administrasi yang berkaitan dengan pembelajaran seperti program tahunan, program semester, RPP, dan lain-lain juga dilakukan.
  - b) Pelaksanaan manajemen kurikulum di SMA Negeri 1 Buengcala meliputi kegiatan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan dokumen yang telah direncanakan sebelumnya, serta melakukan pembagian tugas untuk guru, pembagian jadwal, dan juga pembagian rombongan belajar.
5. M. Arif Khoirudin, jurnalnya yang berjudul Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan memberikan kesimpulan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sebuah manajemen kurikulum harus dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Setelah itu, kegiatan selanjutnya yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi juga harus berjalan sesuai alur yang berlaku. Ketiga tahap tersebut juga memiliki peranan penting dalam sebuah manajemen kurikulum agar apabila terdapat permasalahan dapat segera dilakukan perbaikan.<sup>64</sup>

Hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan di atas adalah adanya aspek pengendalian kurikulum menjadi salah satu hal yang juga akan diamati oleh peneliti. Pengendalian

---

<sup>64</sup> M. Arif Khoirudin, "Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 1 (Januari, 2013), 74-75.

kurikulum tersebut mencakup pengawasan sekaligus evaluasi kurikulum yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Di antara penelitian yang telah disebutkan ada beberapa yang tidak mencantumkan tahap evaluasi atau pengawasan di tempat yang telah diteliti. Selain itu, jenjang pendidikan pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti lebih memilih jenjang Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan pesantren.

Penelitian ini juga mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu memilih manajemen kurikulum mata pelajaran PAI sebagai fokus penelitian. Tahap-tahap manajemen kurikulum yang dilakukan juga terdapat kesamaan, yakni meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi atau pengawasan. Beberapa kesamaan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam proses memperoleh data sehingga akan semakin memperkuat hasil yang didapatkan.